

## Bupati Buton Alvin Hadiri Apresiasi Daerah Berprestasi Regional Sulawesi, Kemendagri Dorong Daerah Fokus pada Hasil, Bukan Administrasi



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah pusat menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah daerah tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepatuhan administratif, melainkan berdasarkan capaian pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro Kendari, Jumat (29/5/2026), yang turut dihadiri Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra bersama jajaran pemerintah daerah.

Dalam forum yang mempertemukan kepala daerah se-Su-

lawesi tersebut, Tito menekankan bahwa indikator keberhasilan daerah saat ini diukur melalui data kuantitatif yang objektif, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, inflasi, serta capaian pembangunan sosial lainnya. "Yang kita pertandingkan adalah yang dapat dihitung secara kuantitatif. Misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Itu tidak bisa dibongki karena datanya berasal dari BPS," ujar Tito.

Menurut Tito, pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen motivasi agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan. Ia juga menilai banyak

Lanjut ke Hal: 7

## Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Minta Tujuh CPNS Yang Ikut Orientasi Utamakan Kepentingan Daerah dan Bangsa



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP- Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc mengingatkan para

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar memaknai profesi aparatur negara sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,

bukan sekadar simbol status sosial. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Ori-

Lanjut ke Hal: 7

**DARI BAUBAU KE ISTANA, SISWA SMAN 2 BAUBAU REYHAN BIDIK PASUKAN INTI PASKIBRAKA NASIONAL 2026, KUASAI LIMA BAHASA**

- SISWA SMAN 2 BAUBAU LOLOS SELEKSI TINGKAT PROVINSI SULTRA**
- MELANJUTKAN TRADISI PRESTASI BAUBAU DI PASKIBRAKA NASIONAL (2021 & 2022)**
- KUASAI 5 BAHASA: INDONESIA, WOLIO, INGGRIS, JEPANG, SPANYOL**
- BERSAING DENGAN PESERTA TERBAIK DARI SELURUH KABUPATEN/KOTA SE-SULTRA**
- BIDIK PASUKAN INTI PENGIBAR BENDERA DI ISTANA PADA HUT RI KE-81**

**“KECERDASAN ANAK INI LUAR BIASA, DIA BAHKAN Menguasai LIMA BAHASA.”**  
LA ODE DARUS SALAM, S.SOS., M.SI. SEKDA KOTA BAUBAU

**DARI BAUBAU UNTUK INDONESIA!**  
DOA DAN DUKUNGAN KITA, SEMOGA REYHAN SUKSES MENGHARUMKAN NAMA SULAWESI TENGGARA

Laporan: Prasetio M, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Kota Baubau kembali mengukir prestasi di tingkat nasional setelah La Ode Reyhan Putra, siswa SMA Negeri 2 Baubau, terpilih mewakili Sulawesi Tenggara dalam seleksi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2026. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi daerah karena diraih melalui proses seleksi ketat yang diikuti peserta terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Kepastian lolosnya Reyhan disampaikan Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode

Darus Salam, S.Sos., M.Si., usai peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.

Menurut dia, keberhasilan itu menunjuk-

Lanjut ke Hal: 7

## Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tegaskan Pancasila Jawaban atas Tantangan Global



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios,

menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi pemersatu bangsa Indonesia, tetapi juga dapat menjadi fondasi dalam mewu-

judkan perdamaian dunia. Penegasan itu disampaikannya saat memimpin peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Lapa-

ngan Upacara SMP Negeri 1 Batauga, Senin (1/6/2026).

Upacara yang ber-

Lanjut ke Hal: 7

## Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Berlangsung Khidmat Jadi Momentum ASN BPS Buton Selatan Refleksi Diri



Penulis Adalah Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Buton

Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP-Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor BPS setempat, Senin (1/6/2026). Kegiatan yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen kebangsaan sekaligus menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peringatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WITA itu dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Buton Selatan, La Ode Ikhsanuddin Hamid, SST.,

M.Si., sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang menyoroti pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan nasional maupun global.

"Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah jiwa bangsa dan pedoman hidup bersama," demikian kutipan amanat Kepala BPIP yang dibacakan dalam upacara tersebut.

Tema peringatan tahun ini, "Pancasila

Lanjut ke Hal: 7

## Dari Baubau ke Istana, Siswa SMAN 2 Baubau Reyhan Bidik Pasukan Inti Paskibraka Nasional 2026, Kuasai Lima Bahasa

generasi muda Baubau yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional.

Sebelum mencapai tahap nasional, Kota Baubau mengirimkan enam delegasi terbaik yang terdiri atas tiga putra dan tiga putri. Setelah melalui serangkaian tes administrasi, kesehatan, kepribadian, intelektual, dan keterampilan baris-berbaris, Reyhan berhasil mengamankan satu-satunya kuota yang berhak melaju mewakili Sulawesi Tenggara.

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa generasi muda Baubau memiliki kemampuan dan daya saing yang sangat baik untuk tampil di tingkat nasional," ujar Darus Salam.

Menurut Darus Salam, Reyhan tidak hanya unggul dalam ketahanan fisik dan kemampuan baris-berbaris, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual yang menonjol. Salah satu kelebihan yang dimiliki pelajar tersebut adalah penguasaan lima bahasa, yakni Indonesia, Wolio, Inggris, Jepang, dan Spanyol.

"Kecerdasan anak ini luar biasa. Dia bahkan menguasai lima bahasa, yaitu Indonesia, Wolio, Inggris, Jepang, dan Spanyol," kata Darus Salam. Ia menambahkan, "Dengan kemampuan akademik dan bahasa yang dimiliki, kami berharap Reyhan dapat memberikan performa terbaik dan membawa nama baik Sulawesi Tenggara."

Secara historis, Paskibraka merupakan wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda Indonesia yang telah berkembang sejak akhir 1960-an. Konsep pengibaran bendera yang melibatkan pelajar dari berbagai daerah diperkenalkan oleh tokoh nasional Husein Mutahar sebagai simbol persatuan dan kebhinekaan bangsa dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bagi Kota Baubau, pencapaian Reyhan melanjutkan tradisi prestasi yang pernah diraih daerah tersebut pada 2021 dan 2022. Perwakilan Baubau yang berhasil menembus tingkat nasional pada periode tersebut

kini diketahui telah berkarier sebagai Polisi Wanita (Polwan), menunjukkan bahwa pembinaan melalui Paskibraka turut melahirkan sumber daya manusia yang berkontribusi bagi negara.

Di tingkat global, kemampuan menguasai lebih dari satu bahasa menjadi kompetensi yang semakin dibutuhkan dalam era konektivitas internasional. Karena itu, masyarakat dan Pemerintah Kota Baubau menaruh harapan besar agar Reyhan dapat lolos sebagai anggota Paskibraka Nasional 2026 dan terpilih dalam pasukan inti pengibar Sang Saka Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. (\*)

## Bupati Buton Alvin Hadiri Apresiasi Daerah Berprestasi Regional Sulawesi, Kemendagri Dorong Daerah Fokus pada Hasil, Bukan Administrasi

kepala daerah yang telah bekerja secara serius dan menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat. "Acara ini merupakan salah satu upaya kita memberikan award untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah. Sekaligus membuktikan bahwa tidak semua kepala daerah buruk. Banyak kepala daerah yang bekerja baik," katanya.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menghadiri kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsudin, Kepala Bappeda Buton Manafu, dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton LM Hidayat. Kehadiran mereka menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Buton dalam mendukung agenda peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang berbasis kinerja.

Penghargaan yang diberikan Kemendagri mencakup sejumlah kategori strategis, antara lain pengendalian inflasi daerah, penurunan angka pengangguran, pengurangan kemiskinan, percepatan penanganan stunting, hingga inova-

si pembiayaan pembangunan melalui skema creative financing. Kategori tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumanerukka mengatakan penghargaan tersebut diharapkan menjadi energi baru bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi pembangunan. "Semoga menjadi penambah motivasi kerja dan penguat semangat bersinergi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih baik ke depan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dijalankan secara parsial. Menurut dia, keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong kesejahteraan masyarakat. "Kita harus mengerjakan bersama-sama. Semua unsur yang ada di daerah

harus melakukan bersama-sama. Ujungnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat kita," katanya.

Secara historis, sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah berbasis hasil mulai diperkuat setelah era reformasi melalui penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat juga mengembangkan berbagai instrumen evaluasi berbasis data untuk memastikan setiap program pembangunan memiliki dampak nyata. Tren serupa juga diterapkan secara global melalui pendekatan evidence-based policy yang digunakan berbagai negara anggota OECD dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Forum Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat budaya kompetisi positif antardaerah. Melalui penghargaan berbasis indikator terukur, pemerintah berharap kualitas tata kelola, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan. (\*)

## Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Minta Tujuh CPNS Yang Ikut Orientasi Utamakan Kepentingan Daerah dan Bangsa

tasi CPNS Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2026 di Aula Lantai II Kantor Wali Kota Baubau, Selasa (2/6/2026).

Dalam kegiatan yang diikuti tujuh CPNS tersebut, Hamsinah menegaskan bahwa sejak menerima Surat Keputusan (SK) CPNS dengan status 80 persen, seluruh aturan mengenai disiplin, etika, dan kinerja ASN telah melekat pada diri setiap peserta. Karena itu, orientasi menjadi tahapan penting untuk mempersiapkan aparatur yang profesional dan siap menjalankan tugas pemerintahan.

"Kota Baubau membutuhkan PNS yang produktif, mau melayani, dan mencapai kinerja yang terukur. Bekerjalah dengan hati dalam melaksanakan setiap tugas pekerjaan," ujar Hamsinah.

Menurut dia, setiap ASN memiliki tiga fungsi strategis yang tidak dapat dipisahkan, yakni sebagai pelak-

sana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Ketiga fungsi tersebut menjadi fondasi dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain membekali peserta dengan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab ASN, Pemerintah Kota Baubau juga memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan Kesultanan Buton. Nilai tersebut dinilai tetap relevan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Di Buton ini, kita mewarisi nilai-nilai yang sangat relevan, di antaranya indera indera somanamo lipu dan poangka-angka taka. Nilai itu kini terangkum dalam semangat kerja bersama menuju Baubau yang ramah, cerdas, se-

jahtera, dan bermartabat," katanya.

Hamsinah menjelaskan, nilai indera indera somanamo lipu mengajarkan pentingnya mendahulukan kepentingan daerah dan negara di atas kepentingan pribadi, sedangkan poangka-angka taka menekankan sikap saling menghargai dan mendukung dalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan kerja. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman moral bagi para ASN muda dalam menjalankan tugasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun sebagian besar peserta berasal dari sekolah kejuruan, mereka tetap harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, budaya organisasi, serta tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang. "Pada masa-masa awal ini, adik-adik tetap perlu beradaptasi. Baik terhadap lingkungan, budaya kerja, maupun kedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri

Sipil,"ujarnya.

Secara historis, penguatan profesionalisme aparatur negara di Indonesia semakin berkembang setelah reformasi birokrasi yang digulirkan pasca-1998 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di tingkat internasional, negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan menjadikan kualitas birokrasi sebagai salah satu pilar utama keberhasilan pembangunan.

Berangkat dari semangat tersebut, Pemerintah Kota Baubau berharap orientasi CPNS 2026 mampu melahirkan aparatur yang berintegritas, adaptif, dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Saya mendoakan agar setelah satu tahun menjadi CPNS dan melewati masa prajabatan, kalian resmi menjadi PNS Kota Baubau," tutup Hamsinah. (\*)

## Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Berlangsung Khidmat Jadi Momentum ASN BPS Buton Selatan Refleksi Diri

la Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", mengandung pesan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki relevansi tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat internasional yang saat ini dihadapkan pada berbagai konflik, ketegangan geopolitik, dan tantangan kemanusiaan.

Dalam amanat itu juga ditegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk berperan aktif menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. "Nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi karakter bangsa Indonesia merupakan modal penting dalam menjembatani perbedaan dan membangun perdamaian," ujar La Ode Ikhsanuddin Hamid saat membacakan pidato tersebut.

Secara historis, Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni

untuk mengenang pidato Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Sejak ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, tanggal tersebut resmi menjadi hari libur nasional dan diperingati setiap tahun sebagai momentum penguatan ideologi bangsa.

Dalam konteks internasional, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kerap dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya terkait penghormatan terhadap perdamaian, keadilan sosial, hak asasi manusia, serta penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah. Karena itu, tema peringatan tahun ini dinilai relevan dengan upaya mewujudkan stabilitas dan perdamaian global.

La Ode Ikhsanuddin

Hamid juga mengingatkan seluruh ASN agar menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau ideologi yang hidup dalam setiap aktivitas kerja. "Nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan, kebijakan, dan pelayanan kepada masyarakat,"katanya. Ia menambahkan bahwa semangat gotong royong, persatuan, dan toleransi harus terus dijaga untuk mencegah munculnya berbagai bentuk intoleransi yang dapat mengganggu harmoni kehidupan berbangsa.

Upacara berlangsung tertib dan penuh khidmat hingga selesai. Melalui peringatan tersebut, seluruh ASN BPS Kabupaten Buton Selatan diajak untuk kembali meneguhkan komitmen kebangsaan. "Mari menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam membangun Indonesia yang adil, damai, maju, dan sejahtera," demikian pesan penutup yang disampaikan dalam amanat upacara. (\*)

## Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tegaskan Pancasila Jawaban atas Tantangan Global

langsung khidmat tersebut dihadiri Wakil Bupati Buton Selatan, Ketua TP PKK Buton Selatan, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Selain aparatur sipil negara (ASN), kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) itu juga diikuti pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA dari berbagai sekolah di Kabupaten Buton Selatan.

ya, Adios mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, tema Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, yakni "Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia", menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan Indonesia sekaligus berkontribusi terhadap

terciptanya perdamaian global yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan, di tengah ketidakpastian dunia, ancaman fragmentasi, perkembangan teknologi, dan dinamika geopolitik internasional, Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun yang menjaga Indonesia tetap kokoh sebagai bangsa yang majemuk dengan lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis.

Bupati Adios juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menciptakan ketertiban

dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari nilai Pancasila merupakan instrumen diplomasi yang dibutuhkan dunia untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.

Lebih lanjut, ia menilai kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran mediasi konflik di berbagai kawasan, serta konsistensi dalam memperjuangkan keadilan

bagi bangsa-bangsa terjajah merupakan implementasi nyata sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Pada kesempatan itu, Adios juga mengajak generasi muda menjadikan Pancasila sebagai

ideologi yang hidup dalam keseharian. Ia meminta seluruh kepala OPD memastikan setiap kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial, berpihak kepada masyarakat kecil, serta terus melawan segala bentuk intoleransi dan

radikalisme demi menjaga harmoni kebangsaan. Ia pun menutup sambutannya dengan mengajak seluruh masyarakat memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi persatuan dan kemajuan Indonesia. (\*)

## Prabowo Rombak Pimpinan Badan Gizi Nasional, Nani S. Deyang Gantikan Dadan Hindayana



Dadan Hindayana

### Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dan menunjuk Nani S. Deyang sebagai kepala badan yang baru. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga dan jajaran kabinet selama hampir satu setengah tahun terakhir.

Pergantian pimpinan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam. Menurut Prasetyo, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Presiden menjadi dasar perubahan kepemimpinan di lembaga

yang dilakukan Presiden terhadap pelaksanaan program pemerintahan. Penilaian tersebut mempertimbangkan berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat, hingga penerima manfaat program yang dijalankan BGN.

Meski terjadi pergantian pimpinan, pemerintah tetap memberikan apresiasi kepada jajaran sebelumnya. "Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun pondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Secara historis, BGN merupakan lembaga yang dibentuk untuk mendukung agenda besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program

yang dilakukan Presiden terhadap pelaksanaan program pemerintahan. Penilaian tersebut mempertimbangkan berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat, hingga penerima manfaat program yang dijalankan BGN.

Meski terjadi pergantian pimpinan, pemerintah tetap memberikan apresiasi kepada jajaran sebelumnya. "Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun pondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Secara historis, BGN merupakan lembaga yang dibentuk untuk mendukung agenda besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program yang dilakukan Presiden terhadap pelaksanaan program pemerintahan. Penilaian tersebut mempertimbangkan berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat, hingga penerima manfaat program yang dijalankan BGN.

Meski terjadi pergantian pimpinan, pemerintah tetap memberikan apresiasi kepada jajaran sebelumnya. "Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun pondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Upaya perbaikan gizi melalui intervensi negara juga telah menjadi praktik yang diterapkan berbagai negara. Jepang, Finlandia, dan Korea Selatan misalnya, sejak puluhan tahun lalu mengembangkan program makanan bergizi di sekolah sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia. Kebijakan tersebut terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda di negara-negara tersebut.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu mempercepat konsolidasi organisasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor. "Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi," ujar Prasetyo. Langkah itu dinilai penting agar berbagai program gizi nasional dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (\*)

## Teddy Jawab Kritik Dino, Diplomasi Prabowo Dinilai Berbuah Nyata



Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menlu Sugiono beberapa waktu lalu.

### Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto telah menghasilkan berbagai manfaat konkret bagi Indonesia, mulai dari peningkatan investasi, penguatan kerja sama ekonomi, hingga perluasan peran diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai tingginya frekuensi lawatan luar negeri Presiden.

Melalui video yang diunggah akun Instagram Sekretariat Presiden pada Senin (1/6), Teddy menyatakan diplomasi tidak dapat diukur hanya dari jumlah perjalanan yang dilakukan seorang kepala negara, melainkan dari hasil yang diperoleh bagi kepentingan nasional. "Bicara diplomasi berarti bicara hasil. Manfaat nyata bagi bangsa," kata Teddy dalam pernyataannya.

Menurut Teddy, salah satu capaian yang dapat dilihat adalah masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun dalam kurun 1,5 tahun terakhir berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan pada bulan lalu disebut menghasilkan komitmen investasi baru sekitar Rp575 triliun.

la juga mencontohkan sejumlah hasil diplomasi lain, seperti penguatan kerja sama dalam forum BRICS, upaya menjaga ketahanan ener-

gi dan pangan di tengah konflik global, kemitraan kerja sama dengan Uni Eropa yang menghasilkan skema tarif nol persen pada 2025, serta penguatan dukungan internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina. "Semua itu adalah hasil konkret diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo melalui berbagai cara, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan," ujarnya.

Teddy menilai situasi internasional saat ini menuntut para pemimpin dunia membangun komunikasi dan kedekatan secara langsung. Menurut dia, hubungan personal antar kepala negara menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai krisis global. "Kita harus panen hubungan yang baik. Bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa meminta bantuan dan begitu pula sebaliknya," katanya.

Menanggapi kritik mengenai biaya perjalanan luar negeri, Teddy menegaskan bahwa kelebihan biaya di luar anggaran resmi negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo. Ia juga menyebut jumlah delegasi yang ikut dalam kunjungan luar negeri telah dipangkas hampir 50 persen dibandingkan pemerintahan sebelumnya. "Kalau dulu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang, sekarang antara 50 sampai 60 orang maksimal," ujarnya.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo melalui unggahan video di media sosial pada Sabtu (30/5). Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu menilai intensitas

perjalanan luar negeri Presiden perlu dikurangi dan sebagian komunikasi dengan pemimpin dunia dapat dilakukan melalui telepon maupun konferensi video. Ia juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan persepsi publik terhadap frekuensi lawatan tersebut.

Dalam sejarah diplomasi Indonesia, aktivitas kunjungan luar negeri kepala negara kerap meningkat ketika terjadi perubahan besar dalam tatanan global. Pada era Presiden Soekarno, diplomasi internasional digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Sementara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, diplomasi ekonomi menjadi instrumen utama untuk menarik investasi dan memperluas pasar ekspor. Di tingkat internasional, pemimpin negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Prancis juga secara rutin melakukan kunjungan bilateral guna memperkuat hubungan strategis dan ekonomi.

Perdebatan mengenai efektivitas kunjungan luar negeri Presiden mencerminkan dua pandangan yang sama-sama menempatkan kepentingan nasional sebagai tujuan utama. Di satu sisi, pemerintah menilai diplomasi tatap muka masih menjadi instrumen penting untuk menghasilkan kesepakatan strategis. Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dan pemanfaatan teknologi komunikasi modern dalam hubungan internasional. (\*)

## Gerindra Bela Diplomasi Prabowo, Kritik Dino Jadi Sorotan Publik

JAKARTA, BP- Partai Gerindra menegaskan bahwa kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto harus dinilai berdasarkan manfaat strategis yang dihasilkan bagi Indonesia, bukan semata-mata dari frekuensi perjalanan yang dilakukan. Pernyataan itu disampaikan menyusul kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyoroti tingginya intensitas lawatan Presiden ke berbagai negara sejak menjabat.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banoeng mengatakan diplomasi tingkat kepala negara memiliki karakter yang berbeda dengan komunikasi virtual. Menurut dia, banyak kesepakatan penting di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, energi, dan kerja sama internasional lahir melalui per-

temuan langsung antar pemimpin negara yang membangun kepercayaan politik jangka panjang.

"Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis lahir dari komunikasi langsung yang membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin," kata Bahtra dalam keterangan resminya, Senin (1/6).

Bahtra menjelaskan setiap kunjungan luar negeri Presiden tidak dilakukan secara individual, melainkan membawa delegasi nasional yang terdiri atas kementerian, BUMN, dan pelaku usaha. Ia mencontohkan kunjungan Prabowo ke Prancis yang menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial senilai sekitar US\$3,5 miliar atau lebih dari Rp61 triliun pada sektor energi, perdagangan, dan pertah-

anan.

"Kunjungan presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang nyata, peluang investasi yang terbuka, dan kerja sama strategis yang dibangun," ujarnya.

Perdebatan mengenai efektivitas diplomasi luar negeri sebenarnya bukan hal baru dalam praktik hubungan internasional. Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia dikenal aktif menjalankan diplomasi langsung melalui forum global, termasuk saat menjadi salah satu penggagas Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung. Di tingkat internasional, pertemuan tatap muka juga kerap menjadi penentu lahirnya kesepakatan besar, mulai dari Camp David Accords 1978 hingga berbagai perundingan ekonomi dalam forum G20.

Sebelumnya, Dino

Patti Djalal menyampaikan pandangannya melalui unggahan video di media sosial. Ia mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan terkait kebijakan luar negeri Indonesia dan meminta pemerintah memperhatikan suara publik mengenai frekuensi perjalanan luar negeri Presiden.

"Dalam perhitungan kami, Presiden Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak menjabat," ujar Dino. Ia menilai sebagian agenda bilateral dapat dilakukan melalui video call atau telepon sehingga negara dapat menghemat anggaran yang digunakan untuk transportasi, pengamanan, logistik, hingga akomodasi delegasi.

Dino juga mencontohkan praktik diplomasi Presiden Meksiko

Claudia Sheinbaum yang beberapa kali berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain itu, ia mengusulkan agar Presiden lebih memaksimalkan pertemuan bilateral saat menghadiri forum internasional seperti PBB, G20, ASEAN, dan World Economic Forum.

Menanggapi kritik

tersebut, Bahtra menegaskan bahwa publik memang berhak meminta transparansi dan akuntabilitas atas biaya perjalanan luar negeri Presiden. Namun, menurutnya, ukuran yang lebih objektif adalah manfaat yang diperoleh Indonesia. "Yang harus menjadi fokus kita bukan seberapa sering presiden melakukan kunjungan luar negeri, tetapi se-

berapa besar manfaat yang berhasil dibawa pulang untuk rakyat Indonesia," kata Bahtra. Menurut Gerindra, jika kunjungan menghasilkan investasi puluhan triliun rupiah, memperluas pasar ekspor, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan posisi Indonesia di panggung global, maka lawatan tersebut merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. (\*)

## Program Bedah Rumah Sultra Naik Tajam, Kuota Tahun 2026 Tembus 10.000 Unit



Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Sulawesi Tenggara pada 2026

### Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP-Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Sulawesi Tenggara pada 2026. Jika pada tahun sebelumnya program tersebut hanya menjangkau 3.077 unit rumah, tahun ini jumlahnya menjadi 10.000 unit rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penghuni rumah tidak layak huni.

Kenaikan alokasi itu disampaikan dalam pertemuan antara Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri, Selasa (2/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Sulawesi Tenggara memperoleh tambahan 650 unit rumah di luar alokasi awal sebanyak 9.350 unit.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan peningkatan kuota tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap

masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak. "Bedah rumah itu peningkatannya luar biasa. Tahun lalu sekitar 3.000-an, tahun ini 10.000. Jadi kita membedah rumah rakyat miskin, rumah rakyat yang kekurangan," ujarnya.

Menurut Maruarar, program perumahan tidak hanya difokuskan pada renovasi fisik bangunan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat. Karena itu, pemerintah akan mengintegrasikan program bedah rumah dengan akses pembiayaan usaha melalui Permodalan Nasional Madani dan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

"Kita ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memiliki kesempatan memperkuat ekonomi keluarga melalui akses permodalan," kata Maruarar.

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyambut positif tambahan alokasi yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, kenaikan kuota dari

3.077 unit menjadi 10.000 unit menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat Sulawesi Tenggara.

"Ini merupakan langkah nyata pemerintah pusat untuk membantu warga yang selama ini masih tinggal di rumah tidak layak huni," ujar Andi Sumangerukka.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap mendukung pelaksanaan program tersebut agar berjalan efektif dan tepat sasaran. "Kami siap menindaklanjuti seluruh arahan Kementerian PKP sehingga manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Secara historis, program BSPS telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sejak diluncurkan secara nasional lebih dari satu dekade lalu, program ini telah membantu jutaan warga memperoleh hunian yang lebih aman dan sehat. Pemerintah juga menjadikan perbaikan kualitas rumah sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di tingkat internasional, program rehabilitasi rumah bagi kelompok berpenghasilan rendah juga diterapkan di berbagai negara. Sejumlah negara di Asia, Amerika Latin, dan Eropa mengembangkan skema bantuan renovasi rumah untuk memperbaiki kualitas permukiman, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait akses terhadap hunian yang layak dan berkelanjutan.

skinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di tingkat internasional, program rehabilitasi rumah bagi kelompok berpenghasilan rendah juga diterapkan di berbagai negara. Sejumlah negara di Asia, Amerika Latin, dan Eropa mengembangkan skema bantuan renovasi rumah untuk memperbaiki kualitas permukiman, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait akses terhadap hunian yang layak dan berkelanjutan.

Dengan tambahan alokasi hingga 10.000 unit pada 2026, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah dengan peningkatan program bedah rumah yang signifikan. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui integrasi program perumahan dan pemberdayaan ekonomi. (\*)

## Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Wagub Sultra Hugua Tekankan Persatuan Bangsa



SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dengan menggelar upacara di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (1/6/2026). Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan global.

Peringatan yang mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia" tersebut menjadi momentum untuk menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema itu juga mencerminkan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia melalui nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan.

Dalam pidato yang dibacakan Hugua, Pancasila disebut sebagai bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, perubahan sosial yang dinamis, serta ketidakpastian geopolitik global, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai fondasi kehidupan nasional.

"Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah jiwa bangsa dan pedoman hidup bersama yang harus terus dihidupkan dalam setiap tindakan dan kebijakan," demikian kutipan pidato Kepala BPIP yang dibacakan Wakil Gubernur Sultra.

Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat eselon, aparat sipil negara (ASN), personel TNI dan Polri, Brimob, Satpol PP, Tagana, serta pelajar SMA dan SMK dari berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara.

Mayor Cpl. Muh. Awaluddin bertugas sebagai komandan upacara. Sementara itu, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih setelah menerima bendera secara simbolis dari inspektur upacara.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra, Adrian. Selanjutnya, perwakilan Paskibraka membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari prosesi resmi peringatan Hari Lahir Pancasila.

Dalam pidatonya, BPIP juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitu-

sional untuk ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila disebut menjadi modal penting diplomasi Indonesia dalam membangun dialog dan menjembatani berbagai perbedaan di tingkat internasional.

"Indonesia harus terus menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu dan bekerja sama demi perdamaian," demikian pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut.

Secara historis, Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni untuk mengenang pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Dalam pidato itulah Soekarno pertama kali memperkenalkan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Sejak saat itu, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi agenda nasional yang bertujuan memperkuat penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara.

Dalam konteks internasional, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia, perdamaian, keadilan sosial, serta penyelesaian konflik melalui dialog. Karena itu, Indonesia kerap menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai salah satu landasan dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda sebagai pewaris masa depan bangsa. Mereka diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup melalui sikap toleran, semangat gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.

"Saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita," demikian kutipan pidato yang dibacakan Hugua.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Sulawesi Tenggara tersebut ditutup dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen kebangsaan serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Melalui semangat Pancasila, Indonesia diharapkan terus menjadi bangsa yang menjunjung tinggi religiusitas, kemanusiaan, persatuan, dan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun global. (Lisna)

## Bupati Buton Tengah Ikuti Forum Strategis Kepala Daerah se-Sulawesi



### Laporan:Ardi

KENDARI, BP- Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Arahan kepada Kepala Daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sulawesi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sabtu (30/5/2026). Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi pembangunan, menjaga stabilitas wilayah, serta menyalurkan pelaksanaan program nasional di kawasan Sulawesi.

Kegiatan yang dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan unsur Forkopimda dari seluruh wilayah Sulawesi itu menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamaris Chaniago, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasa-

nti sebagai narasumber utama.

Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan guna memastikan berbagai program prioritas nasional berjalan efektif hingga tingkat daerah. "Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan," demikian salah satu pokok arahan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga di daerah. "Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat," ujarnya di hadapan para peserta.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasa-

urat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan publik. "Perencanaan pembangunan harus didukung data yang valid agar program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata," katanya.

Bagi Kabupaten Buton Tengah, keikutsertaan Dr. Azhari dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sekaligus menyerap berbagai kebijakan strategis yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Secara historis, forum koordinasi kepala daerah merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia sejak era desentralisasi pascareformasi 1998. Melalui penguatan otonomi daerah yang dimulai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbarui dalam berbagai regulasi berikutnya, koordinasi antara

pusat dan daerah menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keselarasan pembangunan nasional.

Dalam konteks internasional, pola koordinasi semacam ini juga diterapkan di berbagai negara dengan sistem pemerintahan desentralistik, seperti Jerman, Australia, dan Kanada.

Pemerintah pusat di negara-negara tersebut secara rutin menggelar forum bersama pemerintah daerah untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi, keamanan, dan pelayanan publik.

Melalui kegiatan di Kendari ini, pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi semakin kuat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan berkelanjutan, dan menjaga stabilitas daerah maupun nasional. (\*)

## Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Bupati Azhari Tegaskan Pancasila sebagai Fondasi Persatuan Bangsa

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Bupati Buton Tengah, Bumi Praja Labungkari, Senin (1/6/2026).

Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Buton Tengah, Muh. Adam Basan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua dan anggota DPRD, pejabat eselon II, III, dan IV, ASN, unsur TNI/Polri, serta imam masjid se-Kabupaten Buton Tengah.

Upacara berlangsung khidmat se-



bagai wujud penghormatan terhadap lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa. Pada kesempatan itu, Bupati Azhari membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.

Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa

peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengusung tema "Pancasila Pemer-

satu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", peringatan tahun ini menegaskan peran strategis Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa sekaligus pedoman dalam membangun perdamaian dan keadilan di tingkat global.

"Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan

## Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Wabup Butur Rahman Soroti Persatuan dan Perdamaian Dunia



### Laporan: Kasrun

BUTON UTARA, BP- Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kabupaten Buton Utara tidak hanya menjadi momentum memperkuat komitmen kebangsaan, tetapi juga menjadi ajang penghargaan bagi generasi muda yang telah mengemban tugas kenegaraan. Pemerintah Kabupaten Buton Utara menyerahkan piagam penghargaan kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) usai pelaksanaan upacara di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara, Buranga, Senin (1/6/2026).

Penghargaan tersebut diberikan kepada anggota Paskibraka Kabupaten Buton Utara yang telah bertugas pada Upacara Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 dan Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Pemerintah daerah menilai para anggota Paskibraka telah menunjukkan dedikasi, disiplin, dan pengabdian dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Upacara dipimpin Wakil Bupati Buton Utara Rahman, SKM., M.Kes., yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Rahman membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, dengan tema peringatan tahun ini, "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia".

Menurut Rahman, tema tersebut menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa

Indonesia, tetapi juga memiliki relevansi dalam menjawab tantangan perdamaian global yang semakin kompleks.

"Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik," kata Rahman saat membacakan amanat Kepala BPIP RI.

Ia menjelaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman penting dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan membangun karakter bangsa di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat. Karena itu, Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari Pancasila merupakan instrumen diplomasi yang relevan dalam menyelesaikan berbagai konflik internasional. Indonesia selama ini dikenal menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang berakar pada nilai-nilai tersebut.

"Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita," ujar Rahman membacakan pesan Kepala BPIP.

BPIP juga mengingatkan para kepala daerah agar memastikan setiap kebijakan publik yang dihasilkan berlandaskan prinsip keadilan sosial, melindungi kelompok masyarakat yang rentan, serta memberikan akses pembangunan yang mer-

ata kepada seluruh warga negara.

"Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah," tegas Rahman. "Jadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam tindakan dan kebijakan sehari-hari."

Secara historis, Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni untuk mengenang pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945 yang memperkenalkan konsep dasar negara Indonesia. Sejak ditetapkan sebagai hari libur nasional pada 2017, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum memperkuat nilai kebangsaan di seluruh daerah. Dalam konteks global, nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, dan dialog yang terkandung dalam Pancasila kerap dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diperjuangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Turut hadir dalam upacara tersebut Ketua DPRD Buton Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para staf ahli dan asisten sekretariat daerah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Kehadiran para pemangku kepentingan itu menunjukkan komitmen bersama untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pembangunan daerah dan bangsa. (\*)

ketangguhannya dalam mempersatukan bangsa yang majemuk. Di tengah berbagai tantangan dan perubahan dunia, Pancasila tetap menjadi jangkar moral yang kokoh dan bersatu," kutip Bupati Azhari saat membacakan pidato Kepala BPIP.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut menjaga ketertiban dunia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai kemanusiaan, persatu-

an, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi modal penting dalam menjawab berbagai tantangan global serta membangun hubungan antarbangsa yang damai dan berkeadilan.

Dalam pidato tersebut juga ditegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan pembangunan, transformasi teknologi, serta berbagai kebijakan publik harus senantiasa ber-

landaskan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan kepentingan masyarakat.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan, menjaga toleransi, menumbuhkan semangat gotong royong, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.

Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Jayalah Indonesiaku, Merdeka! (\*)

## Kasus Infertilitas Tinggi, RSCM Perkuat Layanan Bayi Tabung Nasional



Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan pentingnya penguatan layanan fertilitas yang tidak hanya mengedepankan teknologi medis,

**Peliput: Andina L**

JAKARTA, BP- Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan pentingnya penguatan layanan fertilitas yang tidak hanya mengedepankan teknologi medis, tetapi juga pendekatan humanis bagi pasangan yang berjuang memperoleh keturunan. Hal itu disampaikannya saat meresmikan peluncuran kembali Klinik Yasmin Reproductive Cluster di RSCM Kencana, Jakarta.

Menurut Dante, perjalanan pasangan yang mengalami gangguan kesuburan merupakan perjuangan besar yang melibatkan harapan dan kondisi psikologis, sehingga pelayanan fertilitas harus mampu memberikan dukungan secara menyeluruh.

Ia mengatakan, pasien yang datang ke klinik fertilitas umumnya tidak se-

dang berjuang melawan penyakit fisik semata, melainkan berupaya mewujudkan kehadiran seorang anak dalam keluarga. Karena itu, tenaga kesehatan dituntut memberikan pelayanan yang mampu merawat harapan sekaligus kesehatan pasien.

P e n g u a t a n layanan fertilitas dinilai semakin penting mengingat tingginya angka infertilitas. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2025 menunjukkan sekitar 17,5 persen populasi dewasa dunia atau satu dari enam orang mengalami infertilitas.

Sementara itu, data Kementerian Kesehatan mencatat infertilitas dialami sekitar 10 hingga 15 persen pasangan usia subur di Indonesia. Dari total 39,8 juta pasangan usia subur, sekitar 4 hingga 6 juta pasangan membutuhkan intervensi medis untuk mem-

peroleh keturunan.

Dante menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan upaya menjaga kualitas generasi masa depan. Berdasarkan data BKKBN, Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) Indonesia pada 2023 berada di angka 2,14 anak per perempuan yang perlu dipertahankan guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, minat masyarakat terhadap layanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) atau bayi tabung terus meningkat. Jumlah pasien nasional tercatat naik dari sekitar 23 ribu orang pada 2021 menjadi 36 ribu orang pada 2024. Saat ini terdapat 59 rumah sakit di 15 provinsi yang telah memiliki izin penyelenggaraan layanan IVF, termasuk RSCM melalui Klinik Yas-

min.

Klinik Yasmin Reproductive Cluster menyediakan delapan layanan utama, meliputi program infertilitas dan bayi tabung, penanganan gangguan haid, endometriosis, sindrom ovarium polikistik (PCOS), keguguran berulang, ginekologi remaja, menopause, hingga preservasi fertilitas. Sepanjang 2025, klinik tersebut mencatat 95 kehamilan dari 221 siklus program yang dijalankan.

Melalui peluncuran kembali ini, RSCM Kencana diharapkan mampu menghadirkan layanan fertilitas yang lebih dekat, komprehensif, dan berbasis teknologi modern, sehingga semakin banyak pasangan di Indonesia memperoleh kesempatan mendapatkan penanganan reproduksi yang optimal dan berkelanjutan. (\*)

## Debarikasi Haji di Soetta Jadi Garda Deteksi Dini Penyakit Jemaah



**Peliput: Lisna**

TANGERANG, BP- Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus menyatakan penguatan deteksi dini dan kolaborasi lintas sektor di pintu masuk negara berhasil mendukung penurunan angka kesakitan dan kematian jemaah haji Indonesia. Hal itu disampaikan saat meninjau proses pemulangan jemaah haji kloter perdana Provinsi Banten di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (2/6).

Menurut Benjamin, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari skrining kesehatan yang telah dilakukan sejak fase keberangkatan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Kebijakan pembatalan keberangkatan bagi calon jemaah yang tidak memenuhi syarat kesehatan dinilai efektif mencegah risiko gangguan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji.

Ia mengungkapkan, saat proses keberangkatan terdapat 14 calon jemaah yang tidak diberangkatkan karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Langkah tersebut, kata dia, berkontribusi pada penurunan signifikan angka kesakitan dan kematian dibanding-

kan penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Benjamin menjelaskan, fase debarikasi menjadi tahapan penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah setelah kembali dari Arab Saudi. Pada tahap ini, petugas melakukan pemantauan menyeluruh guna mendeteksi penyakit menular maupun gangguan kesehatan lain yang memerlukan penanganan lanjutan.

Di Bandara Soekarno-Hatta, petugas kesehatan melakukan observasi visual dan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermo scanner terhadap seluruh jemaah yang tiba. Jemaah yang menunjukkan gejala atau kondisi kesehatan tertentu langsung diarahkan ke pos kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.


Dalam kloter perdana yang dipantau, terdapat enam jemaah yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebagian di antaranya masih dalam observasi karena mengalami penurunan kondisi fisik akibat kelelahan setelah perjalanan panjang.

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, mengatakan active case finding diterap-

kan kepada seluruh jemaah yang tiba melalui wilayah kerja bandara tersebut. Jika ditemukan gejala seperti batuk, pilek, atau demam, jemaah akan menjalani serangkaian pemeriksaan mulai dari registrasi, pengecekan tekanan darah, asesmen dokter, hingga pemeriksaan laboratorium.

Naning menambahkan, kondisi darurat yang paling sering ditemukan saat kedatangan jemaah adalah serangan jantung, sesak napas, dan komplikasi penyakit kronis lainnya. Petugas memberikan pertolongan pertama sebelum merujuk pasien ke rumah sakit terdekat sesuai kebutuhan medis.

Untuk mendukung pelayanan terhadap sekitar 1.600 jemaah yang tiba pada hari itu, BBKK Soekarno-Hatta menyiapkan tenaga kesehatan lengkap selama 24 jam. Benjamin menegaskan keberhasilan pengamanan kesehatan jemaah haji merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari AirNav, kepolisian, Badan Karantina, otoritas bandara, hingga pengelola bandara yang menyediakan fasilitas dan dukungan operasional bagi layanan kesehatan. (\*)

<p><b>PT FAREN GRAFIKA</b></p>  <p><b>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</b></p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA                  Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi                  Redpel: Prasctio                  Korlip: Firman                  Redaktur: Kasrun, Rahim                  Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman</p>	<p>Layouter: Ririn                  Pracetak: Aditya                  Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA                  Komisaris: Erna Agule                  Direktur Utama: Andina Latief                  Manager Keuangan: Nabila DAA                  Manager Iklan &amp; Pemasaran: Jamaluddin                  Kepala Sirkulasi: Robi                  Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman                  Kepala Biro Buton Utara: Kasrun                  Kepala Biro Buton: La Harman                  Kepala Biro Buton Selatan: Firman                  Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin                  Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin                  Agen Buton Selatan: Firman                  Agen Buton: Samrihan                  Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,                  Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01                  Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara                  Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01                  Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

## Praperadilan Ditolak, Mantan Gubernur Lampung Hadapi Proses Hukum



Gubernur Lampung periode 2019-2024 Arinal Djunaidi (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Jumat (5/9/2025)

### Laporan: Alwan

LAMPUNG, BP-Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, terkait penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Lampung Energi Berjaya (LEB). Putusan yang dibacakan pada Selasa (2/6) itu memastikan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tetap berlanjut.

Hakim tunggal Agus Windana dalam amar putusannya menyatakan, "Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon Arinal Djunaidi." Dengan putusan tersebut, status tersangka yang disematkan kepada mantan orang nomor satu di Provinsi Lampung itu dinyatakan sah menurut hukum.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai proses penyidikan yang dilakukan Ke-

jati Lampung telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Penyidik dinilai memiliki dasar yang cukup dalam menetapkan tersangka dan melakukan penahanan, termasuk dukungan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.

Jaksa Kejati Lampung, Rudy Vernando, menyebut majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah alat bukti yang diajukan selama persidangan. Bukti tersebut meliputi keterangan saksi, pendapat ahli, dokumen transaksi keuangan, hingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Proses penyidikan telah berjalan sesuai ketentuan, termasuk mengacu pada Perma Nomor 4 Tahun 2016," ujarnya.

Hakim turut menegaskan bahwa argumentasi pemohon yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat membatalkan

atau mengesampingkan putusan MK lainnya yang masih berlaku. Selain itu, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit tidak menghilangkan kewenangan institusi penegak hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Menanggapi putusan tersebut, penasihat hukum Arinal Djunaidi, Henry Yosodintingrat, menyatakan pihaknya menghormati keputusan pengadilan. "Perbedaan pendapat sudah kami sampaikan sesuai alasan-alasan hukum. Dari pihak termohon juga telah memberikan jawabannya," kata Henry usai persidangan.

Ia menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan penilaian lebih jauh terhadap amar putusan tersebut. "Menilai dan memutus perkara merupakan kewenangan hakim," ujarnya.

Secara historis, praperadilan di Indonesia merupakan mekanisme kontrol terhadap tindakan penyidik

dan penuntut umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sejak 1981. Dalam perkembangannya, kewenangan praperadilan semakin luas setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang membuka ruang pengujian terhadap penetapan tersangka. Di tingkat internasional, mekanisme serupa dikenal dalam sistem peradilan sejumlah negara sebagai judicial review terhadap tindakan aparat penegak hukum guna menjamin perlindungan hak asasi dan prinsip due process of law.

Pasca putusan ini, Kejati Lampung menyatakan fokus menyelesaikan tahapan penyidikan sebelum melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Sementara itu, masa penahanan Arinal akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (\*)

## KKerugian Negara Rp35,7 Miliar, KPK Tahan Tiga Tersangka Baru Korupsi Gedung Pemkab Lamongan

### Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp35,7 miliar. Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti terkait proyek pembangunan yang berlangsung pada periode 2017-2019 tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan ketiga tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih, Jakarta. "Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka," kata Taufik dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6).

Tiga tersangka yang ditahan yakni Mokh Sukiman selaku Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Lamongan, Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra, serta Herman Dwi Haryanto yang pernah menjabat General Manager Divisi Regional III PT BA pada periode 2015-2019.

Selain itu, penyidik juga menetapkan Muhammad Yanuar Marzuki, mantan Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung

Kantor Pemkab Lamongan tahun 2017-2019, sebagai tersangka. Namun, yang bersangkutan belum ditahan karena tidak menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari yang sama.

Menurut KPK, perkara ini berawal dari rencana pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan yang digagas pada 2016. Setahun kemudian, pemerintah daerah menggelar tender proyek dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp154 miliar. Dalam prosesnya, PT AB KSO ditetapkan sebagai pemenang lelang, tetapi penyidik menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam tahapan pengadaan.

"Pembentukan komitmen PT AB KSO diduga hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi mengikuti proses lelang," ujar Taufik. KPK menduga proses pemilihan penyedia jasa tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan sejak tahap awal proyek.

Penyidik juga menemukan indikasi bahwa Ahmad Abdillah telah diminta menjadi pelaksana proyek sebelum proses tender resmi dimulai. Selain itu, pelaksanaan hasil pekerjaan, pembayaran hingga serah terima proyek diduga tidak sesuai aturan yang berlaku. "Proses pelaksanaan kontrak, pemeriksaan, pembayaran, dan serah terima pekerjaan tidak

sesuai dengan ketentuan," kata Taufik.

Dalam penyidikan lebih lanjut, KPK menduga Mokh Sukiman menerima sejumlah uang dari pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Akibat berbagai penyimpangan itu, hasil audit menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan kualitas bangunan yang tidak sesuai kontrak. "Tersangka SKM diduga menerima sejumlah uang dari pihak PT AB KSO," ujar Taufik.

Kasus ini menambal daftar panjang perkara korupsi sektor pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK. Secara historis, korupsi proyek konstruksi dan infrastruktur merupakan salah satu modus yang paling sering terungkap di Indonesia dalam dua dekade terakhir, termasuk sejumlah kasus pembangunan gedung pemerintah, jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Secara global, laporan berbagai lembaga antikorupsi internasional juga menempatkan sebagai salah satu bidang paling rentan terhadap praktik suap, pengaturan tender, dan mark-up anggaran karena melibatkan nilai proyek yang besar serta banyak pihak dalam proses pengadaan. Para tersangka kini dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (\*)

## Dana Jemaah Diduga Disalahgunakan, Aset Bos Travel Umrah Diusut Polisi

### Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Polda Metro Jaya menelusuri aset milik Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, Ahmad Syah Farhan (ASF), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap aliran dana sekaligus memulihkan kerugian yang dialami para calon je-

maah.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imanuddin, mengatakan penelusuran aset menjadi bagian penting dalam proses penyidikan agar dana para korban dapat dikembalikan.

Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan kerugian yang dialami masyarakat akibat tindak pidana

tersebut.

Karena itu, penyidik akan melakukan pelacakan terhadap aset maupun aliran dana yang diduga berkaitan dengan tersangka, termasuk kemungkinan dana tersebut telah dialihkan kepada pihak lain atau digunakan untuk kepentingan tertentu.

Iman menjelaskan, hasil penelusuran aset nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk proses pemulihan kerugian para korban yang telah

menyetorkan biaya perjalanan umrah.

Ia berharap upaya tersebut dapat membantu para calon jemaah yang gagal berangkat agar tetap memiliki kesempatan menunaikan ibadah umrah sesuai rencana mereka.

Sebelumnya, Ahmad Syah Farhan ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (29/5) dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah. Saat ini, yang bersangkutan



telah menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam perkara tersebut, tersangka dijerat Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal

486 KUHP serta Pasal 607 KUHP.

Hasil penyidikan sementara mengungkap bahwa sebagian dana yang disetorkan calon jemaah tidak digunakan untuk proses pemberangkatan um-

rah. Penyidik menemukan indikasi dana tersebut dipakai untuk berbagai kebutuhan lain, termasuk membayar sejumlah influencer sebagai bagian dari kegiatan promosi dan pemasaran paket perjalanan umrah. (\*)

## Peringati Hari Lahir Pancasila, Walikota Baubau H Yusran Fahim Ajak Generasi Muda Hidupkan Nilai-Nilai Pancasila



Laporan: Ardi

yang dibacakannya.

BAUBAU, BP-Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim mengajak seluruh masyarakat untuk kembali menegaskan komitmen kebangsaan dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman Kantor Wali Kota Baubau, Senin (1/6/2026).

Dalam upacara yang mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia" itu, Yusran membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa kemajuan ekonomi, pembangunan, dan perkembangan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan moral serta karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

"Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga pedoman hidup yang harus terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda," ujar Yusran Fahim dalam pidato

Menurut dia, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap hidup di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks.

Yusran menilai Pancasila telah terbukti menjadi fondasi yang mampu menjaga keutuhan Indonesia sebagai negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, dan beragam latar belakang budaya. Di tengah berbagai konflik dan ketidakpastian global, Indonesia dinilai tetap mampu mempertahankan persatuan berkat nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa.

"Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai tantangan, baik nasional maupun global," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan peran Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, nilai musyawarah, mufakat, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan penting bagi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

"Nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen diplomasi Indonesia dalam menjembatani perdamaian dan penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia," ungkapnya.

Secara historis, Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni untuk mengenang pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Soekarno memperkenalkan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila dan menjadi fondasi berdirinya Republik Indonesia.

Dalam konteks internasional, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, seperti penghormatan terhadap kemanusiaan, per-

satuan, dan keadilan sosial, sejalan dengan nilai-nilai yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disahkan pada 1945. Nilai tersebut menjadi dasar berbagai upaya perdamaian dan kerja sama antarnegara hingga saat ini.

Indonesia sendiri telah menunjukkan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian di bawah misi PBB sejak 1957. Hingga kini, Indonesia termasuk salah satu negara yang aktif mengirim personel dalam berbagai operasi pemeliharaan perdamaian internasional sebagai wujud implementasi politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Mengakhiri pidatonya, Yusran Fahim mengajak masyarakat Baubau dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga semangat persatuan, memperkuat toleransi, serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam denyut nadi seluruh anak bangsa. Selamat Hari Lahir Pancasila. Jayalah Indonesiaku. Merdeka!" tegasnya. (\*)

## Walikota Baubau H Yusran Fahim dan Wakil Ketua DPRD Adriansyah: Pancasila Harus Hidup dalam Kehidupan Sehari-hari



Pewarta: Firman

BAUBAU, BP-Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 dimaknai sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengamalan nilai-nilai dasar negara oleh seluruh elemen masyarakat. Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, pesan tersebut mengemuka dari Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE dan Wakil Ketua DPRD Kota Baubau Adriansyah Farmin, ST yang mengajak masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Wakil Ketua DPRD Kota Baubau Adriansyah Farmin menilai Hari Lahir Pancasila bukan sekadar peringatan historis, melainkan kesempatan untuk merefleksikan kembali fungsi fundamental ideologi bangsa dalam menjawab berbagai tantangan zaman.

"Dari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah Pancasila adalah instrumen untuk membentuk kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan lebih sejahtera," ujar Adriansyah.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, tantangan global yang semakin kompleks menuntut generasi muda tidak bersikap pasif terhadap ideologi negara. Sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa, kaum muda diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mem-

perkuat kesejahteraan masyarakat.

Adriansyah berharap generasi muda Kota Baubau mampu menjadi pelopor dalam menumbuhkan budaya toleransi, menjaga harmoni sosial, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim menegaskan bahwa Pancasila harus hadir dalam praktik kehidupan masyarakat, bukan hanya menjadi simbol yang dipajang di kantor pemerintahan maupun ruang-ruang pendidikan. Pernyataan itu disampaikan usai memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Baubau di halaman Kantor Wali Kota Baubau, Senin (1/6/2026).

"Pancasila itu bukan sekadar pajangan yang dipajang di dinding, tapi kita harus melaksanakan poin-poin yang ada di dalam Pancasila itu," kata Yusran Fahim.

Menurut Yusran, Pemerintah Kota Baubau berkomitmen mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan sosial, persatuan, serta penghormatan terhadap keberagaman masyarakat.

"Kami ingin nilai-nilai Pancasila hadir dalam setiap kebijakan dan menjadi dasar dalam membangun daerah yang harmonis, maju, dan berkeadilan," ujarnya.

Yusran juga men-

gajak para orang tua dan tenaga pendidik untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sejak usia dini. Menurutnya, implementasi sila pertama hingga sila kelima secara konsisten akan menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh.

Secara historis, Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni untuk mengenang pidato Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Soekarno pertama kali memperkenalkan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016.

Di tengah dinamika dunia yang diwarnai berbagai konflik, polarisasi sosial, dan tantangan globalisasi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dinilai tetap relevan. Prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi ruh Pancasila sejalan dengan nilai-nilai universal yang dianut banyak negara dalam menjaga perdamaian, keberagaman, dan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Baubau menjadi pengingat bahwa ideologi bangsa tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. (\*)